

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Konteks Penelitian**

Pendidikan merupakan suatu proses untuk memanusiakan manusia, dengan pendidikan manusia dapat berkembang secara signifikan dan memajukan peradaban ke arah yang lebih baik. Pemerataan pendidikan dilakukan sebagai upaya pemenuhan hak setiap orang untuk mendapatkan pendidikan. Dijelaskan lebih lanjut dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional bahwa: “Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.” Sistem pendidikan menjadi salah satu penentu dari kualitas pendidikan, oleh karena itu pemerintah mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang dapat meningkatkan dan menyempurnakan kualitas sistem pendidikan.

Salah satu kebijakan pendidikan yang dikeluarkan oleh pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia, dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) No. 70 tahun 2009 adalah Pendidikan Inklusif. Pendidikan inklusif adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya. Pendidikan inklusif dibuat sebagai upaya untuk meningkatkan kesempatan dan pemerataan pendidikan bagi seluruh warga negara termasuk anak berkebutuhan khusus agar mendapatkan pendidikan yang berkualitas.

Pendidikan inklusif diciptakan karena jumlah anak berkebutuhan khusus yang semakin bertambah namun akses pendidikannya terbatas. Hal ini disebabkan karena lokasi Sekolah Luar Biasa (SLB) masih sedikit sehingga sebagian anak berkebutuhan khusus, karena faktor ekonomi terpaksa tidak disekolahkan oleh orang tuanya karena lokasi sekolah yang jauh dari rumah, sedangkan SD terdekat tidak bisa menerima karena merasa tidak mampu melayaninya. Pemerintah sebagai kepala yang mengatur pendidikan di Indonesia akhirnya mengeluarkan kebijakan pendidikan inklusif sebagai upaya pemerataan pendidikan bagi semua warga negara termasuk anak berkebutuhan khusus sehingga mereka dapat bersekolah di sekolah umum terdekat dari rumahnya.

Pendidikan inklusif memiliki konsep yang sejalan dengan filosofi pendidikan nasional Indonesia yang tidak membatasi akses peserta didik untuk menempuh pendidikan hanya karena perbedaan kondisi awal dan latarbelakangnya.<sup>1</sup> Pada Undang-Undang Dasar 1945 pasal 31 ayat 1 yang berbunyi, “Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan.”<sup>2</sup> Pernyataan ini menegaskan bahwa pendidikan merupakan hak setiap orang termasuk Anak Berkebutuhan Khusus (ABK). Hak mendapatkan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus juga tercantum dalam UU No.20 Tahun 2003 pasal 5 ayat 2 yaitu “Warga negara yang memiliki kelainan baik dalam kondisi fisik, emosional dalam diri, mental dalam diri, intelektual yang terbentuk, dan sosial berhak memperoleh pendidikan khusus.”

Pendidikan inklusif di sekolah umum belum sepenuhnya berjalan efektif karena beberapa faktor seperti sikap guru, pengetahuan tentang pendidikan inklusif, sarana dan prasarana, serta tuntutan orangtua.<sup>3</sup> Tantangan lainnya dalam pendidikan inklusif yaitu masih banyak peserta didik berkebutuhan khusus yang mengalami diskriminasi dan perundungan di lingkungan sekolah, padahal seharusnya sekolah

---

<sup>1</sup> Nenden Ineu Herawati, “Pendidikan Inklusif”, *In of The International Seminar on Philosophy of Education*, (2021), h. 221.

<sup>2</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 31 ayat 1.

<sup>3</sup> Imam Kusmaryono, “Faktor Berpengaruh, Tantangan, dan Kebutuhan Guru di Sekolah Inklusif di Kota Semarang”, *Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar Vol. X No. 1* (Januari 20230), h. 21.

menjadi tempat yang aman bagi peserta didik untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan potensi anak.

Tantangan dalam pendidikan inklusif menjadi tanggung jawab pemerintah dan setiap sekolah untuk diselesaikan bersama. Pemerintah sebagai lembaga terbesar pendidikan harus memfasilitasi satuan pendidikan utamanya yang sudah menerima peserta didik berkebutuhan khusus sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 3 ayat (1) PP No. 13 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas. Fasilitas tersebut mencakup peningkatan kompetensi dan keterampilan pendidik dan tenaga kependidikan yang memiliki kompetensi pendidikan khusus serta menyediakan sarana prasarana yang aksesibel untuk semua peserta didik.<sup>4</sup> Kemudian sekolah melalui kepala sekolah perlu mendukung pendidikan inklusif dengan membuat perencanaan dan pengelolaan yang baik agar pendidikan inklusif dapat berjalan dengan baik.

Kepala sekolah dituntut memiliki kemampuan manajerial yang baik untuk mengatur dan mengelola sekolah yang dipimpinnya. Dalam hal ini kepala sekolah perlu melakukan persiapan dan perencanaan pada program pendidikan inklusif. Kepala sekolah bekerjasama dengan guru dalam mendidik peserta didik, merencanakan dan melaksanakan program pendidikan yang sesuai dengan kebijakan pemerintah.

Proses pembelajaran pada pendidikan inklusif memerlukan regulasi yang kuat untuk menjadi landasan dalam pembelajaran. Metode pembelajaran pada pendidikan inklusif perlu bervariasi agar peserta didik tidak merasa bosan. Materi pembelajaran bagi peserta didik berkebutuhan khusus tidak hanya fokus pada bidang akademik saja, akan tetapi guru juga perlu memberikan pengetahuan yang fungsional dalam kehidupannya.<sup>5</sup>

Kurikulum yang digunakan untuk peserta didik berkebutuhan khusus dan peserta didik normal biasanya disamakan yaitu menggunakan kurikulum nasional.

---

<sup>4</sup> Fieka Nurul Arifa "Tantangan Dalam Mewujudkan Pendidikan Inklusif" *Infosingkat*, XVI.3 (2024), h. 21

<sup>5</sup> Norma Yunaini, "Model Pembelajaran Anak Berkebutuhan Khusus dalam Setting Pendidikan Inklusif", *Journal Of Elementary School Education Vol. 1 No. 1* (2021), h. 21.

Namun perlu adanya perencanaan dan strategi penyesuaian kurikulum untuk mencapai keberhasilan pembelajaran. Semua hal yang berkaitan dengan pendidikan inklusif mulai dari penyesuaian pembelajaran hingga sarana prasarana sekolah tidak terlepas dari peran kepala sekolah sebagai pemimpin.

Dalam penerimaan peserta didik baru, sekolah melakukan proses seleksi berdasarkan PPDB (Penerimaan Peserta Didik Baru) jalur khusus inklusif atau penyandang disabilitas dari pemerintah. SD Negeri Cijantung 06 menerima peserta didik berkebutuhan khusus dengan kuota 5% setiap tahunnya. PPDB bagi peserta didik berkebutuhan khusus diatur dalam PP Nomor 13 Tahun 2020 pada pasal 12 (f) menyebutkan bahwa harus dilakukan penyesuaian rasio jumlah guru dengan jumlah peserta didik berkebutuhan khusus di kelas, misalnya ditetapkan maksimal hanya ada dua peserta didik berkebutuhan khusus untuk masing-masing rombongan belajar. Pelaksanaan pendidikan inklusif di SD Negeri Cijantung 06 dilaksanakan berdasarkan pedoman yang diberikan dinas pendidikan. SD Negeri Cijantung 06 memiliki rombongan belajar sebanyak 19 dengan total 591 peserta didik dan 46 diantaranya merupakan peserta didik berkebutuhan khusus.

**Tabel 1. 1 Data Rombongan Belajar SDN Cijantung 06**

No	Uraian	Detail	Jumlah	Total
1	Kelas 1	L	39	94
		P	55	
2	Kelas 2	L	50	94
		P	44	
3	Kelas 3	L	44	95
		P	51	
4	Kelas 4	L	56	122
		P	66	
5	Kelas 5	L	46	92
		P	46	
6	Kelas 6	L	46	94
		P	48	

**Tabel 1. 2 Jumlah Peserta didik Berkebutuhan Khusus di SDN Cijantung 06**

No.	Kelas	Peserta Didik Berkebutuhan Khusus
1.	1A	-
2.	1B	-
3.	1C	-
4.	2A	2
5.	2B	1
6.	2C	1
7.	3A	2
8.	3B	3
9.	3C	3
10.	4A	3
11.	4B	2
12.	4C	4
13.	5A	3
14.	5B	2
15.	5C	3
16.	5D	1
17.	6A	4
18.	6B	5
19.	6D	7
Total		46

Berdasarkan observasi awal di SD Negeri Cijantung 06, diketahui bahwa jumlah peserta didik yang memiliki kebutuhan khusus sebanyak 7-8 anak di setiap kelas. Peserta didik ini memiliki kondisi yang berbeda-beda mulai dari kategori ringan hingga berat yaitu diantaranya terdapat anak tuna grahita, anak lamban belajar, anak tuna daksa, anak autis, anak dengan gangguan pendengaran, dan anak dengan keterbatasan fisik. Selanjutnya diketahui bahwa sebelum pandemi peserta didik dengan kebutuhan khusus di SD Negeri 06 Cijantung memiliki jam tertentu untuk belajar di kelas lain

dengan salah satu guru yang merupakan lulusan pendidikan luar biasa. Namun karena sekolah kekurangan guru maka hal ini tidak dilakukan lagi.

Mengimplementasikan pendidikan inklusif di sekolah reguler memiliki tantangan yang kompleks seperti yang terjadi di SD Negeri Cijantung 06. Tantangan dalam pendidikan inklusif seperti peserta didik berkebutuhan khusus yang sulit beradaptasi dengan lingkungan begitupun peserta didik lainnya yang merasa kesulitan beradaptasi dan bergaul dengan peserta didik berkebutuhan khusus. Permasalahan ini tentunya perlu diatasi dengan pemahaman kepala sekolah dan bantuan dari guru untuk memberikan pengertian dan menumbuhkan empati diantara peserta didik terhadap perbedaan.

Kepemimpinan kepala sekolah SD Negeri Cijantung 06 dalam mengatasi tantangan dan mengoptimalkan sumber daya sekolah untuk program pendidikan inklusif akan sangat berdampak pada keberhasilan program tersebut. Hal ini dapat dilihat dari tumbuhnya empati peserta didik normal terhadap peserta didik berkebutuhan khusus di SD Negeri Cijantung 06, mereka saling membantu temannya yang kesulitan belajar. Selain itu SD Negeri Cijantung 06 mengikutkan guru-gurunya dalam diklat yang berkaitan dengan pendidikan inklusif. Sekolah juga membuat rapot khusus yang menggambarkan peserta didik dengan standar penilaian yang berbeda menyesuaikan kebutuhan khusus masing-masing peserta didik.

Penelitian dilakukan di SD Negeri Cijantung 06 karena sekolah ini memiliki jumlah peserta didik berkebutuhan khusus yang cukup banyak. Pengimplementasian pendidikan inklusif di SD Negeri Cijantung 06 secara keseluruhan memberikan hasil yang positif, walaupun masih ada tantangan dalam penerapannya tidak membuat sekolah menyerah menjalankan program ini. Dari uraian tersebut peneliti ingin mengkaji lebih lanjut terkait “Peran Manajerial Kepala Sekolah dalam Implementasi Pendidikan Inklusif di SD Negeri Cijantung 06 Jakarta Timur”.

## **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan konteks penelitian yang telah diuraikan di atas, maka penelitian berfokus pada “Peran Kepala Sekolah dalam Implementasi Pendidikan Inklusif di SD Negeri Cijantung 06 Jakarta Timur”. Selanjutnya sub fokus pada penelitian ini yaitu:

1. Perencanaan pendidikan inklusif oleh kepala sekolah. Perencanaan yang dilihat meliputi strategi, keterlibatan tenaga pendidik, dan kemampuan kepala sekolah dalam mengoptimalkan pendidikan inklusif.
2. Pengelolaan tenaga pendidik yang dilakukan kepala sekolah pada program pendidikan inklusif. Pengelolaan yang meliputi perencanaan, pengarahan, dan pengawasan tenaga pendidik dalam menjalankan program pendidikan inklusif di SD Negeri Cijantung 06.
3. Pengelolaan fasilitas fisik sekolah dalam program pendidikan inklusif. Pengelolaan yang meliputi perencanaan, pengadaan, dan perawatan fasilitas pendukung program pendidikan inklusif di SD Negeri Cijantung 06.
4. Implementasi program pendidikan inklusif di SD Negeri Cijantung 06.

## **C. Pertanyaan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan fokus penelitian yang telah dijelaskan, maka pertanyaan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perencanaan pembelajaran yang dibuat oleh kepala sekolah dalam mendukung program pendidikan inklusif di SD Negeri Cijantung 06?
2. Bagaimana peran kepala sekolah mengelola tenaga pendidik di SD Negeri Cijantung 06?
3. Bagaimana peran kepala sekolah mengelola fasilitas fisik dalam mendukung peserta didik berkebutuhan khusus di SD Negeri Cijantung 06?
4. Bagaimana implementasi program pendidikan inklusif di SD Negeri Cijantung 06?

#### **D. Tujuan Umum Penelitian**

Berdasarkan konteks penelitian di atas, maka tujuan penelitian yaitu sebagai berikut:

1. Menganalisis perencanaan pembelajaran yang dibuat oleh kepala sekolah untuk program pendidikan inklusif di SD Negeri Cijantung 06.
2. Menganalisis pengelolaan tenaga pendidik yang dilakukan kepala sekolah untuk program pendidikan inklusif di SD Negeri Cijantung 06.
3. Menganalisis pengelolaan fasilitas fisik yang dilakukan kepala sekolah untuk mendukung peserta didik berkebutuhan khusus di SD Negeri Cijantung 06.
4. Menganalisis implementasi program pendidikan inklusif di SD Negeri Cijantung 06.

#### **E. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada pihak yang terlibat dan masyarakat baik secara teoritis maupun praktis:

##### **1. Secara teoretis**

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan program pendidikan inklusif di sekolah umum pada jenjang sekolah dasar melalui peran kepala sekolah. Selain itu penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap perkembangan kepemimpinan pendidikan inklusif serta dapat dijadikan acuan bagi peneliti lain untuk melakukan penelitian dengan topik yang sama.

##### **2. Secara praktis**

###### **a. Bagi Sekolah**

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih dalam mengenai strategi dan kebijakan kepala sekolah dalam mengimplementasikan pendidikan inklusif di SD Negeri Cijantung 06. Selain itu penelitian ini menggambarkan peran kepala sekolah sebagai pemimpin dalam menciptakan lingkungan yang mendukung bagi semua peserta didik, dan pengembangan program pendidikan inklusif.

b. Bagi Civitas Akademi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi bagi mahasiswa atau dosen lain yang tertarik melakukan penelitian serupa di bidang pendidikan inklusif. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pembaca dan dapat menambah informasi mengenai peran kepala sekolah dalam pendidikan inklusif.

c. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi terkait peran kepala sekolah dalam pendidikan inklusif sehingga dapat membuat kebijakan yang mendukung program pendidikan inklusif. Selain itu penelitian diharapkan dapat digunakan sebagai bahan evaluasi kebijakan pendidikan inklusif di wilayah lain selain SD Negeri Cijantung 06.

d. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan media belajar untuk memperluas wawasan dan pengetahuan peneliti mengenai peran kepala sekolah dalam pendidikan inklusif.

## **F. State of The Art**

State of the art pada penelitian ini dengan judul Kepemimpinan Kepala Sekolah dalam Menciptakan Pendidikan Inklusif Bagi Siswa di SMA Immersion Ponorogo, yang dilakukan oleh Rahmadi Bagus Wijaya pada tahun 2023. Penelitian ini berfokus pada strategi kepala sekolah dalam menerapkan konsep pendidikan inklusif. Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Noviah Dwi Putranti, dkk dengan judul Pengaruh Kepemimpinan Kepala Sekolah terhadap Kebijakan Pendidikan Inklusif di SMAN 3 Pontianak pada tahun 2024, penelitian ini berfokus pada gaya kepemimpinan kepala sekolah dalam mempengaruhi kebijakan pendidikan inklusif. Penelitian yang dilakukan oleh Larasati Azizah dengan judul Kepemimpinan Inklusif Kepala Sekolah Dasar di Kota Yogyakarta pada tahun

2020, berfokus pada pandangan enam kepala sekolah di Yogyakarta dalam memfasilitasi penyelenggaraan pendidikan inklusif.

Penelitian ini berfokus pada peran kepala sekolah dalam implementasi pendidikan inklusif dari segi perencanaan pendidikan inklusif, pengelolaan tenaga pendidik dan pengelolaan fasilitas fisik pendukung pendidikan inklusif. Perbedaan lainnya terdapat pada subjek, objek, waktu, dan tempat penelitian yang berada di sekolah dasar negeri (SD), berbeda dengan penelitian terdahulu yang menggunakan sekolah menengah atas (SMA).

